



**ANALISIS KENDALA DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA  
DINAS PRKPP KABUPATEN BARITO UTARA KALTENG**

**Indah Dirza Lestari**

Universitas Lambung Mangkurat  
dirzalestarii@gmail.com

**M. Zainal Abidin**

Universitas Lambung Mangkurat  
mzainalabidin@ulm.ac.id

**Abstract :** *The purpose of this study was to analyze the constraints and effectiveness of implementing SIMDA Finance at the PRKPP Office of North Barito Regency, Central of Borneo. This study uses a case study method with a descriptive qualitative approach. This survey research intends to analyze the phenomenon of the constraints and Effectiveness of the Implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) in Finance. The 5 (five) dimensions of effectiveness measurement used in this study are based on the opinion of Campbell, J. P. consisting of the dimensions of program success, target success, program satisfaction, input and output levels, and overall goal achievement.*

*The results of this study indicate that there are several obstacles in the implementation of the SIMDA Finance application that need to be improved, including the absence of documentation regarding the summary flow chart that shows the data cash flow/flow, and the lack of comprehensive data integration between SIMDA Finance. and SIMDA BMD between financial reporting and asset reporting. There are still several data input operators (users) of Financial SIMDA who do not understand the financial report cycle, resulting in data input errors and need to improve data input, the capacity of SIMDA Finance's computer server still needs to be upgraded (upgrade), there is still no Electric Generator and lack of Computer UPS which can support the Financial SIMDA Application Server remains on in the event of a power outage and maintenance (maintenance) The Financial SIMDA application is also still dependent on the task force team of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Meanwhile, when viewed from the effectiveness of the Implementation of the Financial SIMDA Application based on the dimensions of the effectiveness of the application of the Financial SIMDA, it shows very effective results in 3 (two) dimensions of Effectiveness, namely program success, target success, and overall goal achievement, but on 2 (two) other dimensions, namely Satisfaction with the Program. and the input-output level only shows effective results.*

**Keywords:** *Management Information System, Implementation, Constraints, Effectiveness of Application of the Financial SIMDA*

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala-kendala dan efektifitas penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian survei ini bermaksud untuk menganalisis fenomena tentang kendala dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. 5 (lima) Dimensi pengukuran efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Campbell, J. P. (1990) terdiri dari dimensi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala-kendala dalam penerapan aplikasi SIMDA Keuangan yang perlu diperbaiki, antara lain adalah belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data, belum terintegrasinya data secara menyeluruh antara SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD antara pelaporan keuangan dan pelaporan asset. masih adanya beberapa operator input data (user) SIMDA Keuangan yang belum memahami siklus laporan keuangan sehingga mengakibatkan kesalahan input data dan perlu perbaikan *input data*, kapasitas kemampuan server komputer SIMDA Keuangan masih perlu ditingkatkan (*upgrade*), masih belum adanya Genset Listrik dan kurangnya UPS Komputer yang bisa mendukung Server Aplikasi SIMDA Keuangan tetap menyala bila terjadi adanya pemadaman listrik serta perawatan (*maintenance*) Aplikasi SIMDA Keuangan juga masih menggantungkan diri kepada tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan jika dilihat dari efektifitas Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan dimensi efektifitas penerapan SIMDA Keuangan menunjukkan hasil sangat efektif pada 3 (dua) dimensi Efektifitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan pencapaian tujuan menyeluruh, namun pada 2 (dua) dimensi lainnya yaitu Kepuasan terhadap Program dan tingkat input-output hanya menunjukkan hasil efektif.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Manajemen, Penerapan, Kendala, Efektivitas SIMDA Keuangan

## **PENDAHULUAN**

Pada organisasi pemerintah khususnya di Indonesia, Pemerintah Indonesia berusaha membuat sistem informasi manajemen yang membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi yang bernilai tambah. Salah satunya adalah yang kita kenal dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya.

Salah satu tonggak penting reformasi manajemen pemerintahan adalah dengan diberlakukannya Paket Undang Undang Keuangan Negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU No. Diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah. Salah satu cara untuk menggunakan kemajuan teknologi adalah dengan memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibesarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. SIMDA ini juga dibuat sebagai respon keinginan Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sampai dengan bulan 30 Juni 2020, Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 440 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada, terdiri dari:

Tabel 1.  
Jenis dan Jumlah PEMDA Pengguna Aplikasi SIMDA  
di Indonesia Tahun 2020

No.	Jenis Aplikasi SIMDA	Jumlah Pemda
1.	SIMDA Keuangan	304 Pemda
2.	SIMDA BMD	403 Pemda
3.	SIMDA Gaji	51 Pemda
4.	SIMDA Pendapatan	169 Pemda
5.	SIMDA Integrated	196 Pemda
6.	Dashboard Keuangan	5 Pemda
7.	Koneksi SMC	225 Pemda

Jumlah PEMDA Pengguna SIMDA	90
-----------------------------	----

Sumber : <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>,  
tanggal akses 5 April 2021

Khusus Aplikasi SIMDA Keuangan dan Pendapatan telah diterapkan oleh berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia. Sejak diterapkan, walaupun banyak kegunaan namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala sehingga efektivitas penggunaannya masih tergantung pada bagaimana usaha penggunanya dalam menerapkan dan mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan SIMDA tersebut. Keberhasilan penggunaan Aplikasi SIMDA yang digunakan Pemerintah Daerah akan membantu Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai data pengelola keuangan serta sistem informasi laporan keuangan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara menerapkan SIMDA pada sebagian metode ialah metode penganggaran, metode penatausahaan pendapatan kas, metode pengurusan pengeluaran kas, metode akuntansi serta peliputan.

Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah memiliki kendala dalam menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan. Penggunaan sistem informasi yang efektif menurut Campbell J.P (1990), dapat diukur dengan melihat keberhasilan membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang

dicapai, dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran- ukuran dalam efektivitas, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output pencapaian tujuan menyeluruh.

Hasil studi kajian terhadap penelitian terdahulu mengenai penerapan SIMDA Keuangan dalam penelitian Febria, dkk (2018) dengan judul Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan daerah belum sepenuhnya dikatakan efektif sehingga perlu usaha untuk mengatasi kendala dan mencari solusi terbaik agar Penerapan Aplikasi SIMDA tersebut bisa diterapkan secara efektif dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Aulia dan Yeni (2016) dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal menyatakan bahwa efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Tegal berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan fenomenologi adalah efektif.

Berdasarkan uraian dan hasil kajian penelitian terdahulu diatas maka diketahui efektifitas penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada suatu daerah berbeda-beda hasilnya dan hal tersebut disebabkan perbedaan kendala-kendala yang dihadapi sesuai dengan kondisi keadaan yang terjadi di masing-masing Pemerintah Daerah yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kendala dan Efektivitas Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Sistem Informasin Manajemen (SIM)**

Raymond McLeod dan Schell (2010) menyatakan Sistem Informasi Manajemen adalah sistem berbasis komputer yang mampu menyediakan informasi bagi para pengguna, sedangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut O'Brien (2002) dikatakan bahwa SIM adalah suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.

### **Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

SIMDA ialah sesuatu sistem data yang dibentuk, dibesarkan serta dipakai buat melaksanakan cara kategorisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berplatform kemampuan. Maksud dari aplikasi SIMDA ini merupakan buat menciptakan laporan keuangan serta informasi keuangan yang relevan, akuntabilitas dan transparansi cocok determinasi yang legal dan mendesak terciptanya pemerintahan yang bagus pada biasanya serta penajaan pengurusan finansial wilayah dengan sediakan sistem pengurusan finansial wilayah berplatform teknologi data pada khususnya. SIMDA sendiri merupakan

suatu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara akurat, untuk meningkatkan proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memberi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. SIMDA merupakan salah satu produk dari penerapan prinsip e-Government yang mulai muncul saat diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yaitu tentang Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang kemudian didukung oleh munculnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

#### **Fungsi, Tujuan, Klasifikasi dan Output Aplikasi dan Keunggulan SIMDA**

Fungsi utama penerapan SIMDA Keuangan adalah Pertama Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban). Kedua, Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat. Ketiga, Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. Keempat, Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan. Kelima, Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) audit.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

1. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
2. Aplikasi SIMDA dikembangkan bersifat generik/berbagi pakai atau dapat digunakan seluruh pemda sehingga pemda tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi,
3. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah,
4. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan,
5. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik,
6. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tujuan adanya program aplikasi SIMDA ini adalah :

1. Untuk menyediakan database yang melingkupi kondisi keuangan, aset daerah, kepegawaian daerah maupun pelayanan publik di daerah yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi pemerintah daerah.



2. Untuk menghasilkan informasi yang komprehensif/akurat kepada manajemen pemerintah daerah.
3. Untuk mempersiapkan kepegawaian daerah untuk meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik. Keempat, Untuk memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Keunggulan dan manfaat Penggunaan SIMDA adalah sesuai peraturan perundang-undangan, Terintegrasi dan berbagi data, *transfer of Knowledge*, kesinambungan pemeliharaan, mudah digunakan dan pengawasan Berkelanjutan. Sedangkan Klasifikasi SIMDA dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu:

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

### **SIMDA Keuangan**

Salah satu jenis aplikasi SIMDA adalah aplikasi SIMDA Keuangan juga berlandaskan pada Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan juga berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 yaitu

tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan dengan mempertimbangkan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Program aplikasi SIMDA Keuangan ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.:

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) audit

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan; 15
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;

4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran

*Output* aplikasi SIMDA Keuangan ini antara lain:

1. **Penganggaran**

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. **Penatausahaan**

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3. **Akuntansi dan Pelaporan**

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Pada Bulan Mei 2020 telah dikeluarkan Rilis versi 2.9.0.0 Aplikasi SIMDA Keuangan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perkembangan versi Aplikasi SIMDA Keuangan melalui beberapa tahapan perubahan peningkatan (update). SIMDA Keuangan yang ada saat ini mengalami tiga tahapan perubahan, yaitu : SIMDA Ver. 1.0; SIMDA Ver. 2.0; dan SIMDA Ver. 2.1.

### **Kendala SIMDA**

Kendala adalah suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2005 : 240) “kendala berarti halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan”. Sedangkan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dialami Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA).

### **Efektivitas SIMDA**

Menurut Siagian (2008) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya , sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan Menurut Bastian dalam Asnawi

(2013) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan efektivitas adalah sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Campbell J.P (1990), Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun 5 dimensi pengukuran efektivitas tersebut, yaitu ini :

1. Keberhasilan program.

Efektivitas program dilihat dari kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

2. Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek keluaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat keluaran dalam kebijakan dan prosedur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan terhadap program.

Kepuasan dianggap sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Para pengguna akan merasa puas apabila pelayanan dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam kategori maksimal dan berkualitas. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka pengguna akan merasa semakin puas, sehingga instansi juga merasa diuntungkan.

4. Tingkat input dan output.

Tingkat input dan output ini dapat diketahui dari perbandingan antara masukan dan keluaran.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh. Ini dapat dilihat dari sejauhmana organisasi dapat melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan. Adanya penilaian umum

sebanyak mungkin dapat menjadi kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Adapun Kriteria Klasifikasi Penilaian Efektifitas dengan mengadopsi Kriteria Penilaian Efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.329 yang penilaian akan dianalisis secara kualitatif yaitu :

Tabel 2.  
Kriteria Klasifikasi Penilaian Efektifitas Penerapan SIMDA Keuangan

Kriteria Efektif	Analisis Kualitatif Deskriptif
Sangat Efektif	Nilai Kriteria Efektif berdasarkan Analisis Peneliti pada 5 Dimensi Efektifitas Menurut Campbell J.P (1990), yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh
Efektif	
Cukup Efektif	
Kurang Efektif	
Tidak Efektif	

Sumber : Data diolah, 2021

### Kerangka Pikir

Berdasarkan analisis fenomena dan kajian pustaka, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Sumber : Data diolah, 2021

### METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (2017, hlm. 73) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Sedangkan menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan studi kasus. Metode survei ini bermaksud untuk menganalisis fenomena tentang kendala dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dinas (SIMDA) PRKPP Kabupaten Barito Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dan kajian literature. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Dalam penelitian ini, informasi tertulis yang dimaksud ialah hasil interview. Hsieh dan Shannon (2005) menerangkan bahwa



teknik analisis isi tidak menggunakan hanya satu pendekatan, melainkan tiga pendekatan yang terdiri dari pendekatan konvensional, terarah serta sumatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kendala-Kendala dalam Penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan rekomendasi solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini

Tabel 3  
Kendala dan Solusi Penerapan SIMDA Keuangan  
Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng

No.	Kendala	Solusi yang di Rekomendasikan
1.	Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan ( <i>summary flow chart</i> ) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Persoalan ini kelihatannya sederhana, tetapi terkadang bias menyulitkan pihak manajer dalam mengawasi arus informasi yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya.	Pihak Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara diusulkan untuk membuat bagan arus ringkasan ( <i>summary flow chart</i> ) yang memperlihatkan aliran/ arus data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak.
2.	Belum terintegrasinya data secara menyeluruh antara aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD antara pelaporan keuangan dan pelaporan <i>asset</i> dimana Lemahnya <i>Data Management Systems</i> ini terbukti dari belum adanya standar operasi yang baku, munculnya	Pihak Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara harus melakukan mekanisme <i>export import</i> data, yaitu dengan cara mengeksport data pelaporan keuangan dari aplikasi SIMDA Keuangan yang kemudian bisa diimpor ke aplikasi SIMDA BMD. Begitu pun sebaliknya, mengeksport data pelaporan <i>asset</i> dari

	<i>kses overflow reporting, redundancy yang tidak efisien dan sebagainya.</i>	aplikasi SIMDA BMD yang bisa diimpor ke aplikasi SIMDA Keuangan.
3.	Masih adanya beberapa operator input data ( <i>user</i> ) ataupun pengguna SIMDA yang belum memahami siklus laporan keuangan pada software SIMDA sehingga mengakibatkan adanya kesalahan output laporan keuangan akibat adanya kesalahan input data yang mengakibatkan perbaikan input ulang ( <i>edit &amp; update</i> ) data kembali. Kurangnya pemahaman terhadap siklus laporan 10 keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengguna SIMDA yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, dan juga disertai kurangnya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan komputer operator (pengguna) operasional Aplikasi SIMDA	Pihak Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara harus mengirimkan para operator ( <i>user</i> ) input data SIMDA untuk mengikuti kegiatan pelatihan secara rutin yang diselenggarakan oleh tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku penyedia jasa Aplikasi SIMDA maupun kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemda Kalteng dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman akuntansi pemerintah daerah dan keterampilan proses input yang benar aplikasi SIMDA secara benar
4.	Kapasitas kemampuan server komputer SIMDA Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng masih perlu ditingkatkan ( <i>upgrade</i> )	Untuk mengatasi masalah Kapasitas kemampuan server computer SIMDA, maka Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara bisa melakukan upgrade Pembelian Komputer Server di masa yang akan datang dengan melakukan rancangan desain perencanaan yang baik, baik dari segi pemilihan <i>hardware server Komputer</i> SIMDA pada merk komputer Server, kecepatan processor komputer, memori komputer, kapasitas penyimpanan data, dan <i>software</i> Pendukung sistem manajemen <i>backup</i> data
5.	Masih belum adanya Genset Listrik dan kurangnya UPS Komputer yang bisa mendukung Server Aplikasi SIMDA tetap menyala bila terjadi adanya pemadaman atau gangguan listrik	Untuk mengatasi Server SIMDA yang tidak bisa menyala pada saat terjadinya gangguan Listrik PLN maka Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara bisa merencanakan mengadakan Pembelian Genset Listrik dan UPS Komputer untuk backup mencegah bila terjadi gangguan Listrik PLN sehingga Server SIMDA Keuangan tetap menyala, sehingga jika terjadi gangguan arus listrik disaat penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan, pegawai masih bisa menggunakan komputer untuk menginput dan menyimpan data output ke aplikasi SIMDA Keuangan
6.	Perawatan ( <i>maintenance</i> ) <i>software</i> SIMDA masih menggantungkan diri kepada tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akibatnya apabila ada kerusakan kerusakan teknis, sekalipun sangat sederhana, tidak bisa segera di atasi sendiri oleh para pegawai.	Mengirimkan para pegawai operator <i>Web Database Administrator</i> SIMDA Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara khususnya di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengikuti pelatihan, kursus keterampilan mengelola <i>web database administrator</i> SIMDA dalam rangka Perawatan ( <i>maintenance</i> ) <i>software</i> SIMDA dan dimasa akan datang bisa diusulkan merekrut sarjana khusus bidang Komputer

<p>Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia pada <i>web database administrator</i> SIMDA yang terampil dalam mengelola aplikasi SIMDA Keuangan karena SKPD masih menggantungkan diri kepada tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akibatnya apabila ada kerusakan-kerusakan teknis, sekalipun sangat sederhana, tidak bisa segera di atasi sendiri oleh para pegawai.</p>	<p>yang mengerti bagaimana mengelola <i>web database administrator</i> SIMDA</p>
--	--

### Efektivitas Penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng

Analisis Efektivitas dari Penerapan SIMDA di Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara ini peneliti menggunakan teori dari Campbell J.P (1990) yang menyatakan bahwa efektivitas diukur dari dimensi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output* dan pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4  
Efektivitas Penerapan SIMDA Keuangan  
Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng

Indikator Efektifitas	Efektivitas	Analisis Kondisi Penerapan SIMDA
<b>Keberhasilan Program</b>	Sangat Efektif	Aplikasi SIMDA Keuangan telah berhasil diterapkan di Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng sejak tahun 2017.
<b>Keberhasilan Sasaran</b>	Sangat Efektif	Penerapan SIMDA Keuangan sangat bermanfaat proses pengelolaan keuangan untuk dapat mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan efektif. Dengan adanya SIMDA Keuangan, tujuan kerja pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng dapat tercapai, seperti laporan keuangan yang diproses dengan cepat dan akurat.
<b>Kepuasan Terhadap Program</b>	Efektif	Tingkat kepuasan pihak Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng terhadap SIMDA Keuangan dapat dikatakan cukup baik. Sebab, semua fitur dan menu yang terdapat dalam aplikasi SIMDA Keuangan dapat mempermudah pekerjaan dan bermanfaat bagi instansi dalam pengelolaan keuangan. Namun, dalam penerapannya pegawai masih ada beberapa pegawai operator SIMDA

		yang masih kesulitan memahami banyak kode akun yang perlu diperhatikan pada saat pemasukan data, sehingga pegawai perlu lebih berhati-hati dalam memasukkan data.
<b>Tingkat Input dan Output</b>	Efektif	Tingkat <i>input</i> pada aplikasi SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng sudah terstruktur dengan baik, sehingga bila menginput data dengan benar, maka hasilnya akan lengkap, namun kadang-kadang masih adanya kesalahan sehingga perlu perbaikan input data. Namun, dalam penerapannya masih ada sebagian pegawai yang masih melakukan kesalahan dalam input data aplikasi SIMDA Keuangan, karena pegawai-pegawai kurang mengikuti pelatihan khusus penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan. Tingkat <i>Output</i> pada aplikasi SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng sudah efektif menghasilkan data laporan keuangan yang sesuai dan akurat walaupun pada kondisi tertentu perlu update data (edit & update) jika terjadi kesalahan dalam proses input data
<b>Pencapaian Tujuan Menyeluruh</b>	Sangat Efektif	Secara keseluruhan, penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara dapat dimengerti, relevan, andal, dapat diperbandingkan dan meningkatkan ketepatan waktu dalam informasi yang dihasilkan. Dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan, Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng tidak perlu melakukan pengelolaan laporan secara manual seperti sebelum adanya aplikasi SIMDA Keuangan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng memiliki beberapa kendala dalam penerapan SIMDA Keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data.
  - b. Belum terintegrasinya data secara menyeluruh antara SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD antara pelaporan keuangan dan pelaporan *asset*.
  - c. Masih adanya beberapa operator input data (*user*) ataupun pengguna SIMDA yang belum memahami siklus laporan keuangan pada *software* SIMDA sehingga mengakibatkan kesalahan input data dan perlu perbaikan input data.
  - d. Kapasitas kemampuan server komputer SIMDA masih perlu ditingkatkan (*upgrade*)
  - e. Masih belum adanya Genset Listrik dan kurangnya UPS Komputer yang bisa mendukung Server Aplikasi SIMDA tetap menyala bila terjadi adanya pemadaman atau gangguan listrik
  - f. Perawatan (*maintenance*) *software* SIMDA juga masih menggantungkan diri kepada tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng
2. Dalam penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng sudah terlaksana dengan baik dan dilihat dari penerapan SIMDA Keuangan menunjukkan hasil sangat efektif pada 3 (tiga) dimensi efektifitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, pencapaian tujuan menyeluruh. menyeluruh namun pada 2 (dua) dimensi lainnya yaitu kepuasan terhadap program dan tingkat input-output hanya menunjukkan hasil efektif.

3. Aplikasi SIMDA Keuangan sangat penting dan berguna untuk membantu pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi pada Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Kalteng.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, L.P, dan Yeni, P.S. 2016. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal*. Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK, Politeknik Harapan Bersama Tegal
- bpkp.go.id, 2021, *Pengenalan SIMDA*, tersedia pada <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, Diakses, 5 April 2021
- bpkp.go.id, 2021, *Sejarah SIMDA*, tersedia pada <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/Sejarah-SIMDA.bpkp>, Diakses, 5 April 2021
- Campbell, J. P. (1990). *Productivity in Organization*. San Fransisco: Joey-Bass.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Febria. Putri Dwi, Yasril Yunus, dan Nora Eka Putri, 2018. *Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar*. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*
- O'Brien, James A. and Marakas, G. M. (2017), *Management Information Systems*, Tenth Edition, Mcgraw-Hill Irwin
- Hsieh, H. F., and Shannon, S. E. (2005). *Three Approaches to Qualitative Content Analysis*. *Qualitative Health Research*, 15, 1277-1288.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Raymond Mc Leod dan Jr., George P.Schell, Pearson, 2008, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi 10, Salemba Empat.

Siagian. P. Sondang. 1982, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sukmadinata, Nana Syaodih (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.12. Bandung: Remaja Rosdakarya

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara